


Implementasi Pengembangan Kebijakan Koperasi di Kabupaten Merauke pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan

Yuni Arniko Eko Sujava¹, Jemi Padua¹, A.P. Yohanis E. Teturan¹, Nurjalal¹

¹ Universitas Musamus, Indonesia

 yunisujava@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the impact of cooperative development policies implemented by the Office of Cooperatives, UMKM, Industry and Trade of South Papua Province in Merauke Regency. The results of the study indicate that the policy has a positive impact on improving cooperative performance, especially in managerial, productivity, and product marketing aspects through training, mentoring, and capital assistance. However, this positive impact has not been evenly distributed across all cooperative sectors, especially in remote areas that still face limitations in infrastructure, market access, and technology. The limited capacity of cooperative administrators and dependence on government assistance are also significant challenges in realizing independent and sustainable cooperatives. Thus, although this policy is oriented towards empowering cooperatives, a more inclusive and sustainable strategy is needed to reach cooperatives in less developed areas.

Keywords: Cooperative Policy Development, Trade Service, Implementation of Cooperative Policy

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

. Naskah ditulis menggunakan spasi 1,5 dengan jenis huruf *times new roman* ukuran 12 pt. Bagian ini menjelaskan tentang latar belakang umum penelitian (secara ringkas dan jelas), *review* terkait topik penelitian yang relevan, uraian tentang kebaruan (*gap analysis*) yang mengandung urgensi dan kebaruan penelitian, serta tujuan penelitian. Latar belakang ditulis **tanpa** penomoran dan atau *pointers*.

Koperasi merupakan salah satu pilar penting dalam sistem perekonomian Indonesia yang berperan sebagai wadah untuk mendorong partisipasi ekonomi masyarakat secara kolektif. Dalam konteks pembangunan daerah, koperasi berfungsi tidak hanya sebagai entitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang bertujuan memperkuat solidaritas masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan anggota dan komunitas secara luas. Di tengah tantangan globalisasi dan ketimpangan ekonomi yang masih tinggi, penguatan koperasi menjadi semakin relevan sebagai strategi pembangunan inklusif yang berkeadilan. Hal ini semakin penting di wilayah-wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan akses pasar seperti Kabupaten Merauke di Provinsi Papua Selatan.

Kabupaten Merauke merupakan salah satu wilayah dengan luas wilayah terbesar di Indonesia dan memiliki keragaman sosial budaya serta potensi sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Ketimpangan antarwilayah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta rendahnya akses terhadap pembiayaan dan pasar menjadi tantangan utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, koperasi dipandang sebagai solusi strategis karena mampu menghimpun potensi ekonomi masyarakat, mendorong usaha kolektif, serta memperkuat daya tawar pelaku ekonomi kecil di hadapan mekanisme pasar yang bersifat kompetitif.

Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan memainkan peran sentral dalam merumuskan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk pengembangan koperasi secara sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan tersebut mencakup aspek legalitas dan kelembagaan koperasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, fasilitasi pembiayaan dan akses permodalan, digitalisasi dan inovasi bisnis koperasi, serta integrasi koperasi dalam rantai pasok ekonomi daerah. Dalam konteks Kabupaten Merauke, implementasi kebijakan tersebut memiliki urgensi yang tinggi mengingat besarnya tantangan struktural dan geografis yang dihadapi dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan partisipatif.

Kebijakan pengembangan koperasi tidak hanya berdampak pada peningkatan jumlah koperasi aktif, tetapi juga diharapkan mampu mengubah struktur ekonomi lokal yang sebelumnya bersifat individualistik menjadi lebih kolektif dan berorientasi jangka panjang. Peningkatan kualitas tata kelola koperasi, penguatan akuntabilitas, serta peningkatan literasi keuangan menjadi bagian penting dalam proses reformasi koperasi yang tengah berlangsung di daerah ini. Namun, seiring dengan implementasi kebijakan tersebut, muncul berbagai persoalan yang perlu dikaji secara mendalam, antara lain tingkat efektivitas kebijakan, sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab permasalahan riil di lapangan, serta dampak konkret terhadap kinerja koperasi dan kesejahteraan anggota.

Studi mengenai pengaruh kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Merauke menjadi penting dan strategis untuk dilakukan dalam rangka menyediakan landasan empiris bagi evaluasi dan perumusan kebijakan publik yang lebih efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana kebijakan-kebijakan yang telah dijalankan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan memberikan pengaruh terhadap perkembangan koperasi dari berbagai aspek, termasuk kinerja usaha, kapasitas manajerial, kontribusi terhadap ekonomi lokal, serta dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut, baik dari sisi internal koperasi maupun dari sisi eksternal seperti lingkungan kebijakan, partisipasi masyarakat, dan dukungan infrastruktur.

Dalam perspektif kebijakan publik, penting untuk memahami bahwa pengaruh suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh proses implementasi, aktor-aktor yang terlibat, konteks sosial dan ekonomi setempat, serta sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya berfokus pada capaian administratif atau statistik formal seperti jumlah koperasi yang aktif atau volume usaha, melainkan juga menyentuh aspek kualitatif seperti perubahan perilaku ekonomi, tingkat kemandirian koperasi, serta kapasitas koperasi dalam mengelola usaha secara berkelanjutan. Di samping itu, pendekatan partisipatif dan kontekstual menjadi penting untuk menjelaskan variasi hasil implementasi kebijakan di berbagai wilayah dalam Kabupaten Merauke yang memiliki kondisi sosial dan geografis yang beragam.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan kombinasi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor-aktor kebijakan, pengurus koperasi, serta masyarakat anggota koperasi. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan tahunan dinas, dan berbagai studi sebelumnya yang relevan. Dengan pendekatan ini, penelitian berupaya menggali secara mendalam bagaimana pengaruh kebijakan dirasakan di lapangan serta faktor-faktor apa saja yang menjadi determinan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan tersebut. Analisis dilakukan dengan mengaitkan antara teori kebijakan publik, konsep pembangunan koperasi, serta data empiris dari wilayah studi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam kajian kebijakan publik berbasis pembangunan ekonomi lokal, khususnya yang terkait dengan pendekatan koperasi sebagai instrumen pembangunan. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan di tingkat daerah dan provinsi dalam menyusun program-program pengembangan koperasi yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, penguatan koperasi di wilayah seperti Kabupaten Merauke akan berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membangun infrastruktur ekonomi yang inklusif.

Kajian Teoritis

a) Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam mengatur dan mengarahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Secara konseptual, kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu keputusan atau serangkaian keputusan yang diambil oleh aktor-aktor pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik dan mencapai tujuan tertentu (Dye, 2013). Dalam konteks pengembangan koperasi, kebijakan publik memegang peran sentral dalam membentuk kerangka regulatif, memberikan dukungan sumber daya, serta mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan penguatan koperasi. Kebijakan publik yang baik tidak hanya mencerminkan kehendak politik pemerintah, tetapi juga harus berakar pada kebutuhan nyata masyarakat serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif.

Model klasik kebijakan publik seperti *policy cycle* menggambarkan bahwa proses kebijakan terdiri dari beberapa tahapan, yakni perumusan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dalam tahapan implementasi, teori dari Mazmanian dan Sabatier (1983) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh tiga variabel utama: kejelasan tujuan kebijakan, kapasitas pelaksana, dan lingkungan eksternal. Model ini relevan untuk menganalisis bagaimana kebijakan pengembangan koperasi yang dirumuskan oleh pemerintah daerah diterjemahkan ke dalam praktik di lapangan, terutama dalam konteks Merauke yang memiliki tantangan struktural dan geografis yang kompleks.

Sementara itu, pendekatan *bottom-up* dalam implementasi kebijakan, seperti yang diusulkan oleh Lipsky (1980) melalui konsep *street-level bureaucracy*, menekankan pentingnya peran aktor pelaksana di tingkat bawah yang seringkali memiliki diskresi dalam menafsirkan dan menjalankan kebijakan. Dalam konteks ini, pengurus koperasi dan petugas dinas di lapangan menjadi aktor kunci dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak hanya bergantung pada kejelasan regulasi di tingkat pusat, tetapi juga pada kapasitas dan motivasi para pelaksana di lapangan.

b) Konsep Koperasi dalam Ekonomi Pembangunan

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam ekonomi pembangunan, koperasi dipandang sebagai sarana strategis untuk menciptakan struktur ekonomi yang lebih merata dan adil. Berbeda dengan entitas bisnis konvensional yang berorientasi pada profit semata, koperasi menempatkan kesejahteraan anggota sebagai tujuan utama, sehingga keberadaannya sangat relevan dalam konteks pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Birchall, 2003).

Menurut pendekatan strukturalis dalam teori pembangunan, keberadaan koperasi dapat menjadi instrumen untuk melawan ketimpangan struktural dalam sistem kapitalis yang cenderung meminggirkan kelompok-kelompok ekonomi lemah. Dengan mengorganisir masyarakat dalam wadah koperasi, kekuatan tawar petani, nelayan, dan pelaku UMKM dapat ditingkatkan. Selain itu, koperasi juga berperan dalam meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi biaya transaksi, serta memperkuat akses terhadap pasar dan sumber daya. Oleh karena itu, pengembangan koperasi tidak hanya menjadi pilihan ekonomi, tetapi juga pilihan ideologis yang mencerminkan semangat solidaritas dan kemandirian.

Dalam perspektif modern, koperasi juga dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Tantangan global seperti disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan dinamika pasar global menuntut koperasi untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga melakukan inovasi. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan koperasi harus mencakup aspek transformasi digital, manajemen modern, serta kolaborasi lintas sektor. Dalam hal ini, peran pemerintah sangat penting dalam memfasilitasi transformasi tersebut melalui regulasi, pendampingan, serta pembiayaan yang berkelanjutan.

c) Kerangka Analisis Pengaruh Kebijakan

Untuk memahami pengaruh kebijakan pengembangan koperasi, diperlukan kerangka analisis yang komprehensif dan kontekstual. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah kerangka *input-output-outcome-impact* yang sering digunakan dalam evaluasi program pembangunan. Dalam konteks ini, *input* mencakup sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah untuk mendukung koperasi seperti anggaran, pelatihan, dan fasilitas. *Output* merujuk pada hasil langsung dari kebijakan seperti jumlah koperasi yang didirikan atau mendapatkan bantuan. *Outcome* mencerminkan perubahan perilaku atau kinerja koperasi, misalnya peningkatan volume

usaha atau kemandirian koperasi. Sementara itu, *impact* mengacu pada dampak jangka panjang seperti peningkatan pendapatan anggota atau kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Di samping itu, kerangka *Governance and Institutional Analysis* (GIA) juga dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana struktur kelembagaan, peran aktor, serta proses tata kelola memengaruhi keberhasilan kebijakan. Dalam konteks koperasi di Merauke, penting untuk melihat bagaimana hubungan antara Dinas Koperasi, koperasi sebagai pelaksana kebijakan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat terjalin secara dinamis. Kelembagaan yang kuat dan tata kelola yang transparan merupakan prasyarat penting bagi efektivitas kebijakan.

Pendekatan lain yang relevan adalah model *logic model framework* yang menekankan hubungan antara perencanaan program, pelaksanaan, serta hasil yang ingin dicapai. Model ini membantu untuk mengidentifikasi titik-titik kritis dalam rantai pelaksanaan kebijakan, sekaligus memberikan dasar untuk evaluasi kinerja kebijakan secara sistematis. Dalam studi ini, model ini digunakan untuk menganalisis secara holistik bagaimana kebijakan pengembangan koperasi dirancang, dilaksanakan, serta memberikan pengaruh pada koperasi di Kabupaten Merauke.

Berbagai studi sebelumnya telah menyoroti pentingnya peran kebijakan publik dalam pengembangan koperasi, baik di tingkat nasional maupun lokal. Studi oleh Suryani (2017) menunjukkan bahwa keberhasilan program penguatan koperasi di Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh sinergi antara kebijakan pemerintah daerah, partisipasi masyarakat, dan pendampingan berkelanjutan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Hadi dan Riyanto (2020) di Sulawesi Selatan menekankan pentingnya peningkatan kapasitas SDM koperasi sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kinerja koperasi di daerah tertinggal.

Di Papua, studi dari Lestari (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan koperasi di wilayah pegunungan sangat tergantung pada kontekstualisasi kebijakan dengan nilai-nilai lokal dan pendekatan budaya yang menghormati struktur sosial masyarakat adat. Dalam hal ini, penting bagi kebijakan pengembangan koperasi untuk tidak bersifat seragam, melainkan adaptif terhadap karakteristik lokal. Temuan ini menjadi sangat relevan dalam konteks Merauke, yang memiliki masyarakat adat dengan nilai-nilai komunal yang kuat dan sistem sosial yang khas.

Selain itu, kajian dari UNDP (2020) menyatakan bahwa koperasi memiliki peran penting dalam pencapaian SDGs, khususnya dalam bidang pengurangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, dan pekerjaan layak. Studi tersebut merekomendasikan bahwa negara-negara berkembang perlu mengarusutamakan pengembangan koperasi dalam strategi pembangunan nasional dan daerah. Hal ini memperkuat argumen bahwa penguatan koperasi tidak hanya menjadi isu sektoral, tetapi juga bagian integral dari strategi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Dalam konteks Kabupaten Merauke, studi akademik mengenai koperasi masih relatif terbatas, terutama yang mengkaji secara sistematis pengaruh kebijakan pemerintah daerah terhadap kinerja koperasi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan literatur dengan menyediakan analisis empiris yang berbasis data lokal, sekaligus memberikan kontribusi konseptual dalam mengembangkan model kebijakan pengembangan koperasi yang lebih kontekstual dan berorientasi hasil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam pengaruh kebijakan pengembangan koperasi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan terhadap kondisi koperasi di Kabupaten Merauke. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dinamika sosial dan kebijakan secara kontekstual, serta memahami persepsi, pengalaman, dan strategi para aktor yang terlibat dalam proses pengembangan koperasi. Dalam pendekatan ini, data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, analisis dokumen kebijakan, serta observasi terhadap proses implementasi kebijakan di lapangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan fenomena secara rinci tanpa melakukan manipulasi variabel. Fokus utamanya adalah menguraikan bagaimana kebijakan pengembangan koperasi dirancang, diimplementasikan, dan dirasakan dampaknya oleh koperasi-koperasi di Merauke. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis sejauh mana kebijakan tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja koperasi, kesejahteraan anggota, serta penguatan ekonomi lokal. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan

pemahaman komprehensif tentang keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan koperasi.

a) Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, dengan fokus pada koperasi-koperasi yang beroperasi dalam berbagai sektor, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi pertanian, koperasi nelayan, dan koperasi konsumsi. Kabupaten Merauke dipilih sebagai lokasi penelitian karena wilayah ini memiliki keragaman sosial budaya, kondisi geografis yang unik, serta peran strategis dalam pembangunan ekonomi Provinsi Papua Selatan. Selain itu, pemerintah daerah setempat memiliki program intensif dalam pengembangan koperasi, menjadikan wilayah ini relevan sebagai lokasi studi empiris.

Subjek penelitian terdiri dari beberapa kategori. Pertama, aparat Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan, khususnya mereka yang terlibat langsung dalam perumusan dan implementasi kebijakan pengembangan koperasi. Kedua, pengurus dan anggota koperasi di Kabupaten Merauke, baik yang telah menerima bantuan maupun yang belum. Ketiga, tokoh masyarakat, akademisi lokal, dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki wawasan atau keterlibatan dalam pengembangan koperasi. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

b) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas wawancara mendalam (in-depth interview), studi dokumentasi, dan observasi partisipatif. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, memungkinkan peneliti mengeksplorasi lebih jauh isu-isu penting yang muncul selama proses pengumpulan data. Pertanyaan wawancara dirancang untuk menggali informasi mengenai persepsi terhadap kebijakan, pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta dampak yang dirasakan oleh koperasi.

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen kebijakan, seperti peraturan daerah, peraturan gubernur, rencana strategis (Renstra) dinas, laporan pelaksanaan program, laporan evaluasi, serta dokumen koperasi (AD/ART, laporan tahunan, laporan keuangan). Dokumentasi ini penting untuk memberikan landasan faktual dan memperkuat hasil temuan dari wawancara. Sementara itu, observasi dilakukan terhadap aktivitas koperasi dan kegiatan yang difasilitasi oleh dinas, seperti pelatihan, pendampingan, atau pameran produk. Observasi memungkinkan peneliti untuk melihat langsung praktik implementasi kebijakan dan interaksi antara pelaksana kebijakan dan penerima manfaat.

c) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik (thematic analysis) yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola, kategori, dan tema-tema utama dari data kualitatif yang diperoleh. Proses analisis dimulai dengan transkripsi data hasil wawancara, penyusunan catatan lapangan, dan pengorganisasian dokumen. Data kemudian dikoding dan diklasifikasikan berdasarkan tema-tema yang berkaitan dengan perumusan kebijakan, pelaksanaan, tantangan, dampak, serta persepsi para aktor. Dalam analisis ini, peneliti berupaya menjaga keterkaitan antara data empiris dengan teori dan kerangka analisis yang telah disusun sebelumnya.

Langkah pertama dalam analisis adalah membaca dan memahami seluruh data secara menyeluruh (data familiarization). Langkah berikutnya adalah melakukan proses open coding, yaitu memberi label pada bagian-bagian penting dari data yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah itu, dilakukan axial coding untuk mengelompokkan kode-kode yang memiliki hubungan logis menjadi tema-tema utama. Tahap terakhir adalah selective coding, yaitu memilih tema-tema yang paling signifikan dan menyusunnya ke dalam narasi analitis yang menjawab pertanyaan penelitian. Seluruh proses ini dilakukan secara iteratif dengan menggunakan bantuan perangkat lunak pengolah data kualitatif (seperti NVivo atau ATLAS.ti) untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi analisis.

d) Validitas dan Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas dan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pejabat dinas, pengurus koperasi, dan masyarakat. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik ini bertujuan untuk mengurangi bias dan meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian. Selain itu, dilakukan member checking, yaitu mengonfirmasi

hasil wawancara kepada informan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sesuai dengan maksud dan pengalaman informan.

Peneliti juga melakukan audit trail dengan mencatat seluruh proses penelitian secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, proses analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dokumentasi proses ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan memungkinkan pihak lain untuk mengevaluasi validitas proses penelitian. Keabsahan data juga dijaga dengan menggunakan catatan lapangan yang lengkap, rekaman wawancara, serta dokumentasi visual untuk memperkuat temuan.

e) Etika Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, peneliti mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian kualitatif, seperti menghormati hak dan martabat partisipan, menjaga kerahasiaan informasi, serta memperoleh persetujuan (informed consent) dari semua informan yang terlibat. Identitas informan dijaga dengan menggunakan kode atau inisial dalam penyajian data. Peneliti juga menjelaskan kepada partisipan mengenai tujuan penelitian, manfaat, dan hak mereka untuk menolak atau menghentikan partisipasi kapan saja tanpa konsekuensi. Prinsip non-maleficence dan beneficence juga diterapkan, yaitu memastikan bahwa penelitian ini tidak menimbulkan kerugian dan sebisa mungkin memberikan manfaat bagi komunitas yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Deskripsi Umum Kondisi Koperasi di Kabupaten Merauke

Koperasi di Kabupaten Merauke beragam dalam jenis dan bentuk, mencakup koperasi simpan pinjam, koperasi pertanian, koperasi nelayan, hingga koperasi konsumsi. Sebagian besar koperasi di Merauke beroperasi di sektor pertanian dan perikanan, mengingat karakteristik geografis dan ekonomi daerah ini yang kaya akan potensi sumber daya alam tersebut. Namun, secara umum, koperasi di wilayah ini menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pengelolaan organisasi, akses pasar, hingga ketersediaan fasilitas pendukung. Berdasarkan data yang diperoleh, meskipun jumlah koperasi di Merauke terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang belum optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai badan usaha yang produktif dan mandiri. Berikut daftar koperasi di Kabupaten Merauke :

Tabel 1.
Daftar Koperasi

No.	Nama Koperasi	Bentuk Koperasi	Jenis Koperasi	Alamat	Distrik
1.	Koprasi Produsen Bulas Comunity Anggrek Wasur	Primer Provinsi	Produsen	Jalan Trans Papua Sota Kab. Merauke	Merauke
2.	Koperasi Konsumen Animha Karya Sejahtera	Primer Provinsi	Konsumen	Jalan Trikora No. 34	Merauke
3.	Koperasi Sumber Rejeki Sehat	Primer Provinsi	Produsen	Jl. Sukarjo Wiropranoto	Merauke
4.	Koperasi Sumber Makmur Sejahtera	Primer Provinsi	Simpan Pinjam	Jl. Mandala	Merauke
5.	Koperasi Jasa Marga Alisam Kai	Primer Provinsi	Jasa	Kampung Afkab Makmur	Muting
6.	Koperasi Produsen Loo Maju Bersama	Primer Provinsi	Produsen	Jalan KM. 50	Uliin
7.	Koperasi Jasa Alisam Nape Berkumpah	Primer Provinsi	Jasa	PT APM. Kampung Bupul	Elikobel
8.	Koperasi Jasa Kojaro Noa Dikenai	Primer Provinsi	Jasa	Kampung Elnggal Jaya	Elikobel
9.	Koperasi Produsen Sumber Rejeki	Primer Provinsi	Produsen	Kampung Elnggal Jaya	Eliobel

Sebagian besar koperasi yang ada di Kabupaten Merauke masih bergantung pada bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi atau pelatihan. Ini mencerminkan adanya ketergantungan yang

tinggi terhadap dukungan eksternal, sementara pengelolaan internal koperasi belum sepenuhnya mandiri dan berkelanjutan. Dalam hal ini, peran Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan sebagai fasilitator kebijakan pengembangan koperasi menjadi sangat penting. Kebijakan yang telah diterapkan bertujuan untuk memperbaiki kinerja koperasi melalui berbagai program pembinaan dan pemberdayaan, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh sebagian besar koperasi.

b) Perumusan dan Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Merauke dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta memperkuat posisi koperasi dalam perekonomian daerah. Kebijakan tersebut meliputi pemberian bantuan modal, pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajerial, serta pembentukan jaringan pasar untuk produk koperasi. Salah satu program unggulan adalah Program Penguatan Koperasi dan UMKM (PPKUM) yang bertujuan untuk memperkenalkan teknologi baru kepada koperasi, meningkatkan kapasitas manajerial, serta menghubungkan koperasi dengan pasar yang lebih luas.

Namun, implementasi kebijakan ini dihadapkan pada beberapa hambatan, terutama yang berkaitan dengan kapasitas pelaksana kebijakan di tingkat kabupaten dan keterbatasan sumber daya. Meskipun program-program tersebut telah dijalankan, sering kali terdapat ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dengan kenyataan di lapangan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, terbatasnya jumlah tenaga ahli yang dapat mendampingi koperasi, serta infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, masyarakat di Kabupaten Merauke yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang beragam juga membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual, agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih mudah diterima dan diimplementasikan secara efektif.

c) Dampak Kebijakan Pengembangan Koperasi terhadap Kinerja Koperasi

Dari segi dampak, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Merauke memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja koperasi, meskipun dampaknya bervariasi antar sektor dan jenis koperasi. Koperasi yang bergerak di sektor pertanian, misalnya, mengalami peningkatan dalam hal produktivitas dan pemasaran produk, berkat adanya pelatihan dan pendampingan dari Dinas Koperasi. Beberapa koperasi juga berhasil mengakses pasar yang lebih luas, baik melalui kemitraan dengan perusahaan swasta maupun melalui promosi produk secara online. Pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah juga membantu koperasi dalam memperbaiki sistem manajerial dan administrasi keuangan, yang sebelumnya menjadi salah satu kelemahan utama dalam pengelolaan koperasi di daerah ini.

Namun, dampak positif ini belum merata di seluruh koperasi. Koperasi-koperasi kecil dan yang terletak di daerah terpencil masih menghadapi tantangan besar dalam mengakses layanan yang disediakan oleh pemerintah. Faktor geografis yang sulit dijangkau, serta terbatasnya fasilitas pendukung seperti transportasi dan komunikasi, menjadi hambatan utama bagi koperasi-koperasi ini untuk berkembang. Selain itu, meskipun ada peningkatan dalam aspek teknis dan manajerial, banyak koperasi yang masih kesulitan dalam hal pengelolaan sumber daya manusia dan pengelolaan pasar yang berkelanjutan. Dalam hal ini, peran pemerintah daerah dalam mengatasi ketimpangan akses dan memperbaiki infrastruktur menjadi sangat penting.

d) Persepsi Pengurus dan Anggota Koperasi terhadap Kebijakan

Dari wawancara dengan pengurus koperasi, sebagian besar menyatakan bahwa kebijakan pengembangan koperasi yang diterapkan oleh pemerintah cukup bermanfaat, terutama dalam hal pemberian pelatihan dan pendampingan. Pengurus koperasi yang lebih terampil dalam manajemen dan pemasaran produk melaporkan adanya peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan keuangan. Namun, beberapa pengurus juga mengungkapkan bahwa banyak program yang dirasakan kurang efektif karena kurangnya perhatian terhadap aspek pengembangan sumber daya manusia dan pemasaran produk secara lebih komprehensif.

Anggota koperasi, di sisi lain, merasakan manfaat dari adanya koperasi dalam hal akses kepada layanan keuangan yang lebih mudah, serta peningkatan kualitas produk hasil pertanian atau perikanan yang mereka kelola. Meskipun demikian, beberapa anggota koperasi mengeluhkan kurangnya transparansi dalam pengelolaan koperasi dan kesulitan dalam mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kebijakan yang mendukung,

masih ada masalah dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan manajemen koperasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut dari pemerintah.

e) Tantangan dalam Implementasi Kebijakan

Tantangan terbesar yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Merauke berkaitan dengan faktor internal dan eksternal. Dari sisi internal, banyak koperasi yang memiliki pengurus dengan kapasitas manajerial yang terbatas, yang mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola koperasi secara profesional. Di sisi lain, keterbatasan akses terhadap teknologi dan informasi menjadi hambatan dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran produk koperasi. Faktor eksternal, seperti kondisi geografis yang terisolasi, keterbatasan infrastruktur, serta tingginya biaya transportasi, juga menjadi kendala besar bagi koperasi di daerah terpencil untuk mengakses pasar yang lebih luas.

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah untuk program pengembangan koperasi juga menjadi masalah utama. Sebagian besar dana yang tersedia hanya dapat digunakan untuk program yang bersifat jangka pendek, seperti pelatihan dasar dan pemberian modal kerja, tanpa ada upaya untuk mendukung keberlanjutan jangka panjang. Oleh karena itu, kebijakan pengembangan koperasi perlu dirancang dengan lebih mempertimbangkan aspek keberlanjutan, seperti dukungan jangka panjang dalam bentuk pembinaan berkelanjutan dan fasilitasi akses pasar yang lebih luas bagi koperasi-koperasi yang berpotensi berkembang.

f) Evaluasi Kebijakan dan Rekomendasi

Secara keseluruhan, kebijakan pengembangan koperasi di Kabupaten Merauke memberikan dampak positif yang cukup signifikan terhadap peningkatan kinerja koperasi, meskipun tantangan besar masih tetap ada. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sinergi antara kebijakan, pengelolaan koperasi, dan masyarakat. Peningkatan kapasitas pengurus koperasi melalui pelatihan lanjutan, serta peningkatan akses pasar melalui program pemasaran yang lebih sistematis, harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pengembangan koperasi ke depan. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan teknologi di daerah terpencil juga sangat diperlukan untuk mendukung pertumbuhan koperasi yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengembangan koperasi yang diterapkan oleh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke memiliki dampak positif terhadap peningkatan kinerja koperasi, meskipun dampaknya belum merata di seluruh sektor dan jenis koperasi. Kebijakan yang meliputi pemberian pelatihan, pendampingan, dan bantuan modal memiliki pengaruh signifikan terhadap penguatan koperasi, terutama dalam hal manajerial, produktivitas, dan pemasaran produk. Namun, masih terdapat sejumlah tantangan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara optimal, antara lain keterbatasan kapasitas pengurus koperasi, ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta tantangan infrastruktur dan geografis yang sulit dijangkau. Secara umum, kebijakan ini berfokus pada pemberdayaan koperasi, tetapi belum berhasil mengatasi masalah-masalah mendasar yang menghalangi kemandirian dan keberlanjutan koperasi di Kabupaten Merauke. Koperasi-koperasi di daerah terpencil, yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi dan pasar, masih menjadi kelompok yang paling terdampak oleh tantangan tersebut. Sementara itu, koperasi yang memiliki kapasitas pengelolaan yang lebih baik dan terhubung dengan jaringan pasar yang lebih luas menunjukkan kemajuan yang lebih signifikan. Rekomendasi penelitian ini adalah agar pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia koperasi, memperkuat jaringan pasar bagi koperasi, serta menyediakan dukungan finansial yang lebih berkelanjutan. Pemerintah juga perlu memfasilitasi koperasi agar dapat mengakses teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing produk koperasi di pasar global.

REFERENSI

- Abdurrahman, W., & Kosmopolitan, I. (2007). *Nilai-nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan. Jakarta: The Wahid Institute.*
- Adamy, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia Teori, Praktik, dan Penelitian.*
- Ahdiat, A. (2022, November 14). 5 Kendala Terbesar UMKM Indonesia dalam Melakukan Transformasi Digital. *Databoks Katadata*. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/banyak-umkmbelum-bisa-bisnis-online-ini-kendala-utamanya>

- Aneta, A. (2012). Perkembangan Teori Administrasi Negara. *Jurnal Inovasi*, 9(1), 1–24.
- Anggara, S. (2018). Kebijakan Publik (E. Soetari, Ed.; 2nd ed.). CV. Pustaka Setia.
- Afandi, A. T. (2018). *Kedudukan Saksi Dalaam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE*. Universitas 17 AGUSTUS 1945.
- Ahmad, S. (2020). *Transformasi Hukum Pembuktian Perkawinan Dalam Islam*. Airlangga University Press.
- Al-Arabiyyah, M. A.-L. (2004). *Al-mu'jam al-wasit*. Maktabat al-Khanji.
- al-Marāḡī, A. M. (1946). *Tafsīr al-Marāḡī*. Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.
- Anshori, A. (2013). Kesaksian Wanita dalam Pandangan Ulama Tafsir. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(2).
- As-Shan'ani, A.-I. M., & Al-Kahlani, I. I. (2005). *Subul As-Salam Juz III*. Cairo: Syarikah Makhtabah Wa Maghba'ah Musthafa Al-Baby.
- Asnawi, H. S. (2012). Membongkar Patriarkhisme Islam sebagai Kearifan Budaya Lokal: Sebuah Kritik terhadap UU. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 223–240.
- Asriaty, A. (2016). Kontroversi Kesaksian Perempuan Dalam Qs Al-Baqarah (2): 282 Antara Makna Normatif Dan Substantif Dengan Pendekatan Hukum Islam. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(1), 175–198.
- Damayanti, A. N. (2020). *Penghulu dalam sorotan (alasan penghulu menikahkan pasangan dengan akad nikah bawah tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)*. IAIN Palangka Raya.
- Fauzi, M. Y., Hermanto, A., Ismail, H., & Arsyad, M. (2022). Metode Ijtihad Dan Dinamika Persoalan Di Kalangan Imam Madzhab. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 10(1), 67–79.
- Hermanto, A., & Ismail, H. (2020). Criticism of Feminist Thought on the Rights and Obligations of Husband and Wife from the Perspective of Islamic Family Law. *J. Islamic L.*, 1, 182.
- Hisyam, M. A., & Abou-Bakr, O. (2023). Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice in Divorce Lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 8(2), 187–202.
- Ikhsanudin, K. H. (2002). *Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren*. Yogyakarta: YKF Dan Ford Foundation.
- Iqbal, M. (2023). *Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pembuktian Perkara Pidana Pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue Kabupaten Nagan Raya)*. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Ismanto, B. (2022). Persyaratan saksi dalam pernikahan (pendapat imam syafi'i dan imam abu hanafi). *Jurnal Tafsirul Iqtishodiyah (JTI)*, 2(2), 282–289.
- Manan, H. A. (2005). *Penerapan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama*.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Miftakhul, H. (2021). *Kesaksian perempuan dalam pernikahan (analisis pemikiran husein muhammad dan musdah mulia)*. universitas islam negeri raden intan lampung.
- Mubādalāh, I. (n.d.). *Discrimination against wife in the perspective of CEDAW and*.
- Muhammad, K. H. H. (2021). *Islam Agama Ramah Perempuan*. IRCiSoD.
- Pelu, I. E. A. S., & Helim, A. (2015). *Konsep kesaksian hukum acara perdata di Peradilan Agama Islam*. Setara Press.
- Setiawan, Achma Hendra & Rejekiingsih, Tri W. 2009. Dampak Program Dana Bergulir Bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Aset, Hlm.109-115.
- Singarimbun, Masri & Sofian, Effendi. (Eds.). 2011. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Pustaka LP3ES
- Ulumuddin, M. (2015). Kesaksian Perempuan: Telaah Terhadap Status dan Kedudukan Perempuan dalam Hukum Islam. *EGALITA*, 10(2).
- Wahyudi, M. I. (2009). Nilai Pembuktian Saksi Perempuan dalam Hukum Islam. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 8(1).
- Wathani, S., Ismail, H., & Abdillah, A. M. (2022). Reconstruction of Women's Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahrur's Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective. *J. Islamic L.*, 3, 159.
- Werluka, L. (2019). Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). *Jurnal Belo*, 4(2), 228–248.